

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelolaan PBB-P2

1. Apa dasar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana mekanisme pendataan objek dan subjek PBB-P2 di Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana mekanisme penetapan dan penagihan PBB-P2 di Kabupaten Sleman ?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran PBB-P2 yang dilakukan wajib pajak Kabupaten Sleman ?

B. Kondisi PBB-P2 di Kabupaten Sleman

1. Bagaimana kondisi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman selama tiga tahun terakhir ?
2. Berapa jumlah Objek PBB yang ditetapkan oleh Dipenda Kabupaten Sleman ?
3. Berapa jumlah perbandingan pokok massal PBB yang ditetapkan oleh Dipenda Kabupaten Sleman ?
4. Apa penyebab penerimaan PBB-P2 masih belum dapat mencapai target ?
5. Apa faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya target penerimaan PBB-P2 ?
6. Apa saja upaya yang dilakukan Dipenda untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 ?
7. Apa saja kendala yang dihadapi Dipenda dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ?

C. Strategi

1. Bagaimana langkah-langkah penyusunan strategi yang dilakukan oleh Dipenda untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 ?
2. Apa saja strategi yang digunakan oleh Dipenda untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 ?
3. Bagaimana efektivitas strategi terhadap upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman ?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 yang disusun Dipenda Kabupaten Sleman ?

D. Faktor Lingkungan Internal

1. Bagaimana kemampuan pegawai Dipenda dalam pengelolaan PBB-P2 di Dipenda Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pengaruh ketersediaan dana terhadap kinerja Dipenda dalam pengelolaan PBB-P2 ?
3. Bagaimana kondisi dan pengaruh keberadaan sarana operasional terhadap kinerja Dipenda dalam pengelolaan PBB-P2 ?

E. Faktor lingkungan Eksternal

1. Bagaimana Sosialisasi pengalihan PBB-P2 dari dana perimbangan menjadi pajak daerah di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman terhadap penerimaan PBB-P2 ?
3. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman dalam membayar PBB-P2 ?

4. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu ?
5. Apa saja penyebab kurang efektifnya penerapan sistem komputerisasi terhadap upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 ?